

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Rianto, 2000. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Denim, Sudarwan, 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ismaya, Samun, 2011. *Pengantar Hukum Agraria*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marzali, Amri, 2012. *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, Lexy J, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosda Karya.
- Noeng, Muhadjir, 2000. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin.
- Noeng, Muhadjir, 2003. *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Research*. Yogyakarta: Raka Sarasin.
- Parlindungan, A.P., 1998. *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahardjo, Satjipto, 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Richard, 2019. *Kepastian Hukum Atas Pengakuan Hak Milik Adat*. Jakarta: Cintya Press.
- Richard & Silviana, Ana, 2022. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Perkembangan, Hukum Pertanahan, Perolehan Tanah dan Hak Tanggungan*. Bandung: Bimedia.

Santoso, Urip, 2015. *Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Soekanto, Soekanto, 2007. *Pengantar Validasi Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Soekanto, Soerjono & Mamuji, Sri, 1985. *Penelitian Hukum Normatif- Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

Sumardjono, Maria S.W., 2007. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

B. Jurnal

Fuad, 2020. “*Sosio Legal Research Dalam Ilmu Hukum*”. Widya Pratama Hukum, Vol.2 (No.2).

Rahayu, B., 2015. “*Pelaksanaan Perpanjangan atau Pembaharuan Hak Guna Bangunan di Atas Tanah Negara Pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Wonogiri*”. Dinamika Hukum, Vol.6 (No.2).

Wiratraman, Herlambang P., “*Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya*”, Center of Human Right Law Studies Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk Keperluan Perusahaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Pemberian Hak Atas Tanah untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Hak Atas Tanah.